

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2018.
- Atmasasmita, Romli, *sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, 2018.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Fadjar, A. Mukti, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Intrans Publishing, Malang, 2018.
- Gilisen, John dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, disadur oleh Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, Bogor, 1997.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Informasi Modul 02.
- _____, *Tanpa Tatap Muka, Laporan Tahunan KPK 2020*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Laporan Tahunan 2020 Dalam Suasana Covid-19*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2020.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UI Press, Jakarta, 2003.

- _____, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, ditulis dalam Bunga Rampai “Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia,” Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2019.
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Mas’udi, Wawan dan Poppy S. Winanti, *New Normal, Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2020.
- Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual, Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2006.
- _____, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Nasution, B. Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Setiadi, Wicipto, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia Dalam Merespon Perubahan Sosial*, tulisan tertuang di dalam buku “*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*” Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Suadi, Amran, *Filsafat Hukum; Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019.

- Sinjar, Muhammad Arafah, *Penegakan Hukum di Tengah Aneka Ragam Kepercayaan Masyarakat Terhadap eksistensi COVID-19*, ditulis dalam buku *Penegakan Hukum di Masa Pandemi COVID-19*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2021.
- Sobari, Mohammad, *Rasa Keadilan di Dalam Hari Rakyat*, tulisan tertuang dalam buku *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana; Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.
- Supardi, *Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, ditulis dalam buku “*Penegakan Hukum di Masa Pandemi*,” Kencana, Jakarta, 2021.
- _____, *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018.
- Suryana, *Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.
- Tumpa, Arifin H., *Menuju Peradilan Yang Agung*, Mahakarya Renggang, Jakarta, 2012.
- Wajdi, Farid, *Tantangan dan Penegakan Hukum*,” ditulis dalam Bunga Rampai “*Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*,” Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2019.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Wignjosubroto, Soetandyo, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini*, tulisan tertuang di dalam buku “*Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia*,” Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002.
- Zaidan, M. Ali, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, tulisan tertuang dalam buku *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Adisti, Neisa Angrum, dkk, *Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana*, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Afif, Zaid, *Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 2 No. 5 Juli-Desember 2018.
- Ajie, Radita, *Batasan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit to Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 – Juni 2016.
- Aneke, Barr PC., *The Legality of Virtual Court Hearing in Nigeria: The Way Forward*, MUNFOLLIJ (2) 2021.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Azis, Noor Muhammad, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian HUKUM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Urgency of Legal Research and Analysis of the Established of legislation)*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 1 Nomor 1, April 2012.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian HUKUM Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Cahyaningrum, Dian, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurna Info Singkat diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No. 14/II/Puslit/Juli/2020.
- Hiariej, Eddy O.S., *Modul 1, Pengantar Hukum Acara Pidana*, diunduh dari <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>.
- Husna, Nelly Mulia, Faisal A. Rani, dan Syarifudin Hasyim, *Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)*, Syah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1 April 2017.
- Hutahaen, Armunanto dan Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1, Maret 2010.
- Iswantoro, Wahyu, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.

Abdul Mukti, 2021

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Lumbanraja, Anggita Doramia, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19*, Jurnal Cripedo, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.
- Mahkamah Agung, *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespon Pandemi COVID-19*, Amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Hari Jadi Mahkamah Agung RI Ke-75 19 Agustus 2020.
- Muslih, M., *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar)*, Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.
- Nola, Luthvi Febryka, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Purnama, Panji, *Penerapan e-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Volume 10 Nomor 1, April 2021.
- Sagama, Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Sihotang, Nia Sari, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Supriyadi dan Aminudin Kasim, *Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.
- Tamim, BED., *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 3/Jul-Ags/2018.
- Waldron, Jeremy, *The Rule of Law*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First Published We Jun, 22, 2016, <https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/#RuleLawRuleLaw>.
- Yuliana, *Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Volume 2 Nomor 1, February 2020.

Internet

Covid.go.id, *Peta Sebaran*, diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

Djuhriyadi, Mohamad, “*Jaksa Agung: Sidang Vicon perlu Dikukuhkan dalam Hukum Acara Pidana*,” <https://independensi.com/2021/03/04/jaksa-agung-sidang-melalui-vicon-perlu-dikukuhkan-dalam-hukum-acara-pidana/>.

Guritno, Tatang, *Satu Tahun Pandemi, Kejaksaan Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/04/20441551/satu-tahun-pandemi-kejakung-lakukan-lebih-dari-500000-sidang-online>, tanggal 19 Juli 2021.

Halim, Devina, *Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diredas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/08264781/read/2020/07/14/08264781/ini-kendala-sidang-online-menurut-jaksa-agung-dari-potensi-diredas-hingga>

Ifdal, *Karya Tulis Ilmiah, Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung*, <https://pa-padang.go.id/wp-content/uploads/2021/03/OPTIMALISASI-PERDILAN-ELEKTRONIK-DALAM-MEWUJUDKAN-PERADILAN-YANG-AGUNG-Drs.-Ifdal-S.H..pdf>, tanggal 20 Juli 2021.

KBBI, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/adil>

Kuswandi, *Sidang Virtual di Tengah Pandemi, Solusi yang Masih Menyisakan Problem*, <https://www.jawapos.com/features/05/06/2020/sidang-virtual-di-tengah-pandemi-solusi-yang-masih-menyisakan-problem/>

LeIP, *Infografis PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>

Manurung, Eric, *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mengakses Keadilan Perkara Pidana Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7fdb2f5133d/penggunaan-teknologi-dalam-mengakses-keadilan-perkara-pidana-online-oleh--eric-manurung?page=4>.

PN Jakarta Timur, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, diakses dari <http://sipp.pn-jakartatimur.go.id/>.

PN Tanah Grogot, “*Pengertian Peradilan*,” <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilanWHO,> “*Numbers a glance*,” https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI37_lisLG7wIVBCUrCh3A5wW-EAAYASAAEgLqjPD_BwE.

Abdul Mukti, 2021

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Ramadhan, Ardito, *Permintaan Rizieq untuk Sidang Tatap Muka Dikabulkan Hakim*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/07363881/permintaan-rizieq-untuk-sidang-tatap-muka-yang-akhirnya-dikabulkan-hakim?page=all>.
- Riza, Angga, “*Minta Tatap Muka, Jerinx Tolak Sidang Digelar Online*,” <https://news.detik.com/berita/d-5162980/minta-tatap-muka-jerinx-tolak-sidang-digelar-online>.
- Sahbani, Agus, “*Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi*,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5edfd188dad3f/problematika-sidang-pidana-daring-saat-pandemi/>.
- Saiful Anam&partners, *Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses dari <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Saputra, Erandi Hutomo, dkk, *Habib Rizieq Beberkan 5 Alasan Tolak Sidang Online: Sabotase hingga Diskriminasi*, <https://kumparan.com/kumparannews/habib-rizieq-beberkan-5-alasan-tolak-sidang-online-sabotase-hingga-diskriminasi-1vMgvalw402/full>.
- _____, *Deretan Sidang Online dan Offline Saat Corona: Jerinx hingga Djoko Tjandra*, <https://kumparan.com/kumparannews/deretan-sidang-online-dan-offline-saat-corona-jerinx-hingga-djoko-tjandra-1vNAuU4ZX2m/full>
- Simanjuntak, Leonard Eben Ezer, *Sidang Online Perkara Kekarantinaan Kesehatan Atas Nama Terdakwa Mohammad Rizieq Bin Husein Syihab Alias Habib Muhammad Rizieq dan Kawan-Kawan Dinyatakan Dicabut, Siaran Pers*, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=0&idsu=0&id=2441>
- Tafsir learn, “*Al Ma'idah: 8*,” <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma%27idah/ayat-8>.
- Tim detikcom, “*Asa Habib Rizieq Minta Sidang tatap Muka Akhirnya Jadi Nyata*,” <https://news.detik.com/berita/d-5505260/asa-habib-rizieq-minta-sidang-tatap-muka-akhirnya-jadi-nyata>.
- Wardah, Fathiyah, *Ombudsman Nilai Sidang Secara Virtual Berpotensi Maladministrasi*, <https://www.voaindonesia.com/a/ombudsman-nilai-sidang-secara-virtual-berpotensi-maladministrasi/5455734.html>
- Yanuar, Azis, “*Tolak Sidang Online, Rizieq: Silahkan Majelis Hakim dan Jaksa Lanjutkan Sampai Vonis Tanpa Saya*,” <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/19/tolak-sidang-onlinerizieq-silahkan-majelis-hakim-dan-jaksa-lanjutkan-sidang-sampai-vonis-tanpa-saya>.
- Youtube, Sidang Pertama Habib Rizieq Shihab atas Kerumunan Petamburan Megamendung dan RS Ummi Bogor, dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=v9OPJJv5bw8>.

_____, Menolak Dibawa Sidang Online, Habib Rizieq Berdebat Dengan Jaksa, dapat diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=IQSMDOceEY4>.

_____, Momen Rizieq Shihab Debat dengan Majelis Hakim di Ruang Sidang, dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=gkIT3I0bLv4>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 5772.

Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, LN Tahun 1984 No. 20, TLN No. 3273.

Undang-Undang Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Tahun 1985 No.73, TLN No. 3316.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874.

Undang-Undang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Undang-Undang Kejaksaan, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 2009 No. 158, TLN No. 5077.

Undang-Undang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Tahun 2009 No. 159, TLN No. 5078.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234

Abdul Mukti, 2021

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Undang-Undang Pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109.
- Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, LN Tahun 2018 Nomor 128, TLN No. 6236.
- Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Tahun 2019, No. 894.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Tahun 2020, No. 1128.
- Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Komisi Yudisial RI, Jakarta.